

Bank Pemerintah Pertama Republik Indonesia Pelengkap Kemerdekaan: Nasionalisasi Bank Rakyat Indonesia di Purwokerto (1946-1950)

Citra Nur Hikmah¹, Abrar², M. Hasmi Yanuardi³

Prodi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Jakarta

Email: ¹citra2104cnh@gmail.com, ²abrar@unj.ac.id,

³mhasmiyanuardi@unj.ac.id

Abstract: *This writing is motivated by the history of the struggle at the beginning of independence which can not only be seen through physical resistance or diplomacy, but also in economic resistance, especially through banking history during the revolution that has not been recorded perfectly. This writing uses the historical method by taking into account the stages including: Heuristics, Verification, Interpretation and Historiography. The purpose of this research is to describe the development of Bank Rakyat Indonesia at the beginning of independence in Purwokerto (1946-1950). The results achieved in this study were in the period after independence, Indonesia had to experience various problems in various fields, one of which was the socio-economic field. Efforts made by the government to overcome these problems is to empower the role of banks to maintain Indonesia's economic strength. The bank chosen by the government at that time was Syomin Ginko to be nationalized as Bank Rakyat Indonesia based on PP No. 1 of 1946 concerning the determination of BRI to be the first government bank and a complement to independence.*

Keywords: *Nationalization, Bank, BRI, Purwokerto*

Abstrak: Penulisan ini dilatarbelakangi oleh sejarah perjuangan di awal kemerdekaan yang bukan hanya dapat dilihat melalui perlawanan fisik atau diplomasi saja tetapi juga dalam perlawanan ekonomi khususnya melalui sejarah perbankan di masa revolusi yang belum tercatat sempurna. Penulisan ini menggunakan metode historis dengan memperhatikan tahapan-tahapan antara lain: Heuristik, Verifikasi, Interpretasi dan Historiografi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perkembangan Bank Rakyat Indonesia pada awal kemerdekaan di Purwokerto (1946-1950). Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah pada periode setelah kemerdekaan, Indonesia harus mengalami berbagai permasalahan di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang sosial-ekonomi. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut ialah dengan memperdayakan peran perbankan untuk menjaga kekuatan ekonomi Indonesia. Bank yang dipilih pemerintah saat itu ialah Syomin Ginko untuk dinasionalisasikan menjadi Bank Rakyat Indonesia berdasarkan PP No. 1 Tahun 1946 tentang penetapan BRI menjadi bank pemerintah pertama sekaligus pelengkap kemerdekaan.

Kata Kunci: Nasionalisasi, Bank, BRI, Purwokerto

PENDAHULUAN

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai *bank note*. Bank juga dapat diartikan sebagai bahan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Takdir, 2017, p. 1)

Penelitian mengenai sejarah perbankan pada awal kemerdekaan sudah cukup banyak dan berkembang. Namun, dominan lembaga yang diteliti adalah *De Javasche Bank* atau yang kita kenal sekarang Bank Indonesia (BI) dan masih sangat sedikit penelitian mengenai lembaga keuangan BRI. Padahal jika dilihat dari sejarahnya BRI merupakan lembaga keuangan pertama yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia setelah Indonesia merdeka dan berperan dalam mempertahankan kedaulatan negara disektor ekonomi. Dibalik pendirian BRI ini terdapat kisah heroik seorang anak bangsa yang dapat dicontoh. Kondisi kemiskinan dan merosotnya kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah pedesaan di pulau Jawa yang melatar belakangi lahirnya bank ini.

Kondisi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan masih sangat buruk. Proses pergantian pemerintah dari kolonial ke Republik menimbulkan gejolak disemua aspek kehidupan bernegara. Atmosfer politik pada saat itu juga masih tidak menentu. Ancaman baik dari luar ataupun dalam negeri sewaktu-waktu dapat menggulingkan pemerintahan yang sah. Hal tersebut semakin memperparah kondisi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Secara umum, pada waktu itu kemerdekaan belum memiliki dampak apapun terhadap kemakmuran bangsa. (Ricklefs, 2007, p. 470)

Selain permasalahan politik mengenai pengakuan kedaulatan yang harus di hadapi Indonesia di awal kemerdekaan, Indonesia juga harus menghadapi permasalahan di bidang ekonomi yang dapat dikatakan mengalami kemandegan baik secara mikro maupun makro (Djiwandono, 2005, p. 5). Keadaan ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan juga masih memprihatinkan berbagai

permasalahan ekonomi muncul seperti: kehancuran disektor produksi, blokade ekonomi oleh Belanda, Inflasi yang terjadi karena beredarnya banyak mata uang, serta kekosongan kas negara. Hingga keadaan semakin dipersulit karena kedatangan NICA yang membonceng Sekutu untuk merebut kemerdekaan Indonesia.

Di samping membenahi permasalahan politik dengan berbagai upaya baik dengan jalan perang maupun diplomasi, Pemerintah RI juga mengatasi persoalan di bidang ekonomi untuk mempercepat proses pemulihan keadaan ekonomi dengan memberdayakan peran perbankan yang berfungsi untuk melaksanakan koordinasi pengurusan bidang ekonomi dan keuangan. Sehingga Pemerintah RI pada periode setelah kemerdekaan mengambil alih *Syomin Ginko* salah satu aset bank yang dimiliki Jepang dan menasionalisasikannya menjadi BRI berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penetapan BRI menjadi bank pemerintah pertama. (Arsip Nasional Republik Indonesia: Arsip Sekretariat Negara RI No.374, Peratoeran Pemerintah No. 1 Tahoen 1946, 1946)

Kondisi keuangan BRI pada masa permulaan kemerdekaan sebenarnya relatif baik. Di samping membantu pemerintah dalam masa perjuangan, BRI juga melayani masyarakat baik yang berpenghasilan tetap, masyarakat pedesaan, serta pengusaha menengah dan nasional meskipun dengan pelayanan yang masih sederhana (Museum BRI: Lokakarya Guru Museum BRI). Lahirnya lembaga keuangan ini ditengah-tengah masyarakat dinilai dapat memperbaiki sosial-ekonomi rakyat. Menurut Harrord Domar (Arsyad, 1999, pp. 64-69) dalam teori pertumbuhan ekonomi menganggap bahwa modal harus dipakai secara efektif, kerana pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. Teori ini pula membahas mengenai pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Seperti yang dijelaskan dalam teori tersebut mengenai peranan modal menjadi sangat vital dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi.

Lembaga keuangan BRI merupakan salah satu bank yang mendapat kedudukan khusus dari pemerintah sebagai bank pengkrditan yang memberikan pinjaman atau modal baik bagi kalangan menengah maupun masyarakat kecil seperti petani. Di mana pinjaman tersebut dapat dijadikan modal untuk

meningkatkan kesejahteraan hidup, hal ini akan berdampak kepada pendapatan perkapita penduduk dan menunjang pendapatan nasional yang akan memicu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sehingga dapat disimpulkan adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) yang signifikan antara pertumbuhan kredit (pinjaman) dengan pertumbuhan ekonomi. Melihat pengaruh lembaga keuangan ini baik bagi masyarakat kecil, menengah dan tingkat nasional membuat penulis tertarik untuk menelitinya.

Fenomena yang terjadi mengenai liberalisasi serta regulasi sektor perbankan di Indonesia dinilai mencederai cita-cita bangsa dengan mengizinkan kepemilikan hampir 99% pihak asing. Dominasi ini membuat pihak asing mempunyai akses yang kuat terhadap data dan jaringan perekonomian dalam negeri. Dampaknya, Indonesia semakin mudah dipenetrasi oleh pihak asing. Padahal di awal kemerdekaan, Indonesia menilai kemerdekaan juga berarti kemandirian dalam pengelolaan sumber daya ekonomi tanpa didikte oleh kekuatan asing guna menjadi tuan di negeri sendiri. Jika keadaan benar demikian, sebaiknya pemerintah dan masyarakat merefleksi diri dengan sejarah perbankan di awal kemerdekaan yang penuh gejolak dan perjuangan dalam membantu mempertahankan kedaulatan. Melihat fenomena tersebut, membuat penulis menitik beratkan kepada permasalahan yang akan dijawab, yaitu: *Mengapa Pemerintah RI memilih Syomin Ginko pada masa pendudukan Jepang untuk dinasionalisasikan menjadi BRI ? Lalu, bagaimana perkembangan BRI setelah dinasionalisasi menjadi bank pemerintah pertama Indonesia (1946-1950)?*

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perkembangan BRI pada masa Revolusi di Purwokerto (1946-1950). Sedangkan, kegunaan dari penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi. Secara teoritik meskipun tidak melahirkan teori baru, tetapi diharapkan penelitian ini dapat memperkaya tema - tema kajian Sejarah Sosial dan Ekonomi, mengenai sejarah perbankan di Indonesia, sekaligus menambah pengetahuan mengenai sejarah awal kemerdekaan Indonesia yaitu mengenai kajian perjuangan kemerdekaan dalam bidang ekonomi. Dimana perjuangan selalu dikaitkan dengan perang dan diplomasi. Penulis ingin memperlihatkan sisi lain dengan perjuangan ekonomi.

Sedangkan secara praktis kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan yang dapat dijadikan masukan bagi lembaga keuangan lainnya untuk meningkatkan pelayanan terhadap umum terutama masyarakat menengah dan bawah. Jika melihat sumber yang digunakan dalam penelitian ini dominan berasal dari museum BRI yang berada di Purwokerto, diharapkan menarik para pembaca untuk berkunjung ke sana melihat sumber dan bukti - bukti secara langsung serta bagi pendidik dapat mengoptimalkan pemanfaatan museum BRI ini sebagai sarana pembelajaran sejarah.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan dan analisis historis melalui studi kepustakaan dalam pengumpulan data. Data dan informasi yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan data primer dan sekunder. Data Primer yang diperoleh dari arsip, surat kabar, ataupun majalah yang sejaman dengan tahun penelitian, sedangkan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, seperti beberapa penelitian, buku-buku, bahan bacaan, dan jurnal ilmiah lainnya yang terkait dengan pembahasan mengenai Sejarah Perbankan di awal kemerdekaan. Data yang telah terkumpul tersebut kemudian diklasifikasikan, diinterpretasikan dan disusun untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan dan analisis historis serta kajian kepustakaan diharapkan mampu menjelaskan mengenai alasan pemerintah RI menasionalisasikan BRI di awal kemerdekaan dan perkembangannya setelah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Lahirnya BRI di Purwokerto (1895)

Bank Rakyat Indonesia merupakan kelanjutan dari Bank Priyayi yang berada di Purwokerto, Bank ini dirintis pertama kali oleh seorang Patih di Purwokerto bernama Raden Aria Wirjaatmadja (Surat Kabar Bataviaasch Nieuwsblad, 15 Maret 1909) pada tahun 1894 tetapi disahkannya tepat pada 16 Desember 1895 (Suharto, 1988, p. 29) dengan nama "*Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren*" atau Bank Bantuan dan Tabungan Pegawai

Pemerintahan Bangsa Indonesia (Suharto, Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia, 1987, p. 7) atau lebih di kenal dengan sebutan Bank Priyayi. Bank tersebut memberikan pinjaman kepada para pegawai negeri bangsa Indonesia dan juga kepada para tukang serta petani dengan tujuan membebaskan mereka dari jeratan rentenir dan pelepas uang.

Raden Aria Wirjaatmadja adalah sosok yang berjasa dalam pendirian lembaga perkreditan bagi rakyat kecil, selain dikenal sebagai seorang Patih yang baik di Kabupaten Banyumas, ia juga dikenal sebagai pegawai yang ahli dalam keuangan. Di dalam surat kabar yang beredar berbahasa Belanda "*De Vader van het Lanbouwcrediet*" (Surat Kabar Bataviaasch Nieuwsblad, 15 Maret 1909) menyebutnya sebagai Bapak Kredit Pertanian. Jasanya dalam pendirian lembaga keuangan ini dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat pedesaan terutama Purwokerto, selain dibantu oleh pegawai pribumi Raden Patih juga dibantu oleh pegawai-pegawai Pemerintah bangsa Eropa terutama dalam bidang organisasi. Mengingat pada saat itu sulit bagi pribumi untuk mendirikan badan atau organisasi yang resmi dan diakui.

16 Desember 1895, Empat orang pegawai mendatangi seorang notaris untuk memulai sebuah pekerjaan besar dalam perjalanan kaum pribumi, yaitu: mendirikan bank. Empat orang pegawai itu adalah: Raden Aria Wirjaatmadja yang menjabat sebagai Patih Purwokerto, Raden Atma Saprada sebagai *Ondercollecteur* (Wakil Pengumpul Pajak) di Afdeling Purwokerto, Raden Atma Soebrata sebagai Wedana Distrik Purwokerto dan Raden Djaja Soemitra sebagai Wedana Kelas Satu Purwokerto, Distrik dan Afdeling Purwokerto. (IIP D. Yahya, 2018, p. 3).

Kondisi kesejahteraan masyarakat pada abad XIX dan awal abad XX yang mengalami kemunduran terutama di daerah pedesaan pulau Jawa dan Madura membuat orang-orang Indonesia semakin melarat.¹ Keadaan seperti ini membuat

¹ Pada abad XIX hingga XX Pribumi harus menghadapi kebijakan Belanda yang sangat merugikan bagi pihak Indonesia, yaitu kebijakan mengenai sistem tanah paksa (*Cultuurstelsel*). *Cultuurstelsel* yang tertera dalam Staatsblad (Lembaran Negara)No. 22 tahun 1834, no. 22. Dampaknya bertambah angka kemiskinan di Nusantara khususnya di Pulau Jawa karena kurangnya penanaman komoditas pangan yang mengakibatkan terjadinya kelaparan.

masyarakat terdesak untuk membutuhkan kredit atau pinjaman demi bertahan hidup. Namun, untuk memperoleh kredit tersebut pada waktu itu hanya bisa didapat dari para rentenir/ pelepas uang dan pengijon dengan bunga yang sangat besar, yaitu: hampir 100% setahun. (Suharto, Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia, 1987, p. 7)

Pemerintah Kolonial sendiri telah menentukan bunga yang harus ditanggung debitur dalam hubungan utang-piutang di Indonesia melalui *Staatsblad* 1880 Nomor 83. Tabel di bawah ini memberikan penjelasan tentang jumlah pinjaman, besarnya bunga, dan batas pelunasan serta persentase bunga yang harus dibayar penerima utang.

Tabel 1. Besar Kredit dan Bunga Kredit

Jumlah Pinjaman	Besar Bunga	Batas Pelunasan dan Persentase Bunga
20 sen atau kurang	½ sen	3 bulan atau 90% / tahun
20 – 40 sen	1	Idem
40 – 60 sen	1,5 sen	Idem
60 – 80 sen	2 sen	Idem
80 – 100 sen	2.5 sen	Idem
f.1 – f.25	6% / bulan	3 bulan atau 72% / tahun
f.25 – f.50	5% bulan	6 bulan atau 60% / tahun
f.50 – f.75	4% bulan	9 bulan atau 48% / tahun
f.75 – f.100	3% bulan	12 bulan atau 36% / tahun

Sumber: *Tijdschrift van Nederlandsch-Indië II, 1898.*

Kondisi perekonomian masyarakat Banyumas pada waktu itu yang melatarbelakangi lahirnya bank ini. Keadaan ekonomi masyarakat yang rata-rata bermata pencaharian sebagai petani mendapat perhatian dari Sang Patih. Karena pada masa itu, banyak pegawai pemerintah dan petani yang terlibat pinjam meminjam dengan para rentenir. Tingginya bunga pinjaman yang diberikan oleh rentenir membuat masyarakat menjadi terlilit hutang yang semakin banyak (Suharto, Sejarah Pendirian Bank Pengkreditan Rakyat, 1988, p. 29).

Menurut Van Deventer dengan makin melaratnya orang-orang Indonesia, terutama petaninya, maka dimana-mana di Pulau Jawa dan Madura kebutuhan kredit mereka akan meningkat. Apabila sekali mereka terjerumus dalam jeratan uang makin lama akan terbenam makin dalam (Marjanto Danusaputro, 1997, p.

16). Hal tersebut lah yang mendorong Raden Aria Wirjaatmadja pada saat itu untuk mendirikan suatu badan atau organisasi yang dapat membantu masyarakat dari jeratan para pelepas uang yang semakin menyiksa rakyat.

Selain desakan kebutuhan hidup, pajak yang ditarik oleh Pemerintah Belanda juga menjadi faktor yang membuat para penduduk pedesaan terutama pulau Jawa (kelompok masyarakat terbesar di Indonesia) meminjam kepada rentenir. Kewajiban membayar pajak baik berupa hasil bumi atau uang tunai telah menjadi beban ekonomi bagi pribumi.

Permasalahan penduduk desa lainnya sehubungan dengan masalah keuangan semakin bertambah akibat kebiasaan hidup mereka yang cenderung boros dan kurang mampu mengatur keuangannya (Suharto, *Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia*, 1987, p. 12). Terlihat saat sang Patih menghadiri pesta sunatan anak sahabatnya yang begitu mewah, tradisi pesta seperti itu sudah berkembang dan dianggap lumrah oleh masyarakat desa walaupun mereka harus menjual sawah, tanah ataupun meminjam kepada para rentenir untuk mencukupi biaya yang dibutuhkan.

Keprihatinan Raden Aria Wirjaatmadja semakin besar ketika beliau menghadiri pesta sunatan anak seorang guru. Sebagaimana lazimnya sebuah pesta, acara ini dimeriahkan dengan pertunjukkan wayang kulit yang memerlukan biaya yang cukup banyak. Untuk membiayai keperluan pestanya ini, Sang guru terpaksa meminjam uang kepada seorang pelepas uang dengan bunga relatif tinggi. Setelah selesai pesta, Raden Patih bertanya kepada Sang guru perihal pinjaman tersebut. Raden Patih akhirnya menawarkan pinjaman uang kepada Sang guru dengan bunga lebih rendah unuk melunasi hutangnya kepada pelepas uang (*Bank Rakyat Indonesia*, 1995, p. 5).

Hingga pada akhirnya, Raden Aria Wirjaatmadja tertarik untuk melakukan penyelidikan mengenai utang pegawai pemerintah kepada para pelepas uang. Para pelepas uang pada waktu itu kebanyakan dari pedagang Arab, Cina dan Eropa. Berdasarkan hasil penyelidikannya Raden Patih menunjukkan bahwa utang seluruh pegawai pada waktu itu mencapai f 30.000,-. (Suharto, *100 Tahun BPR di Indonesia*, 1996, p. 12) Melihat kondisi tersebut, Raden Patih membuat gagasan

untuk membuat badan usaha yang bergerak dalam simpan pinjam yang diharapkan badan tersebut dapat memberikan pinjaman kepada pemerintah dan petani dengan bunga yang rendah, sehingga membuat masyarakat Banyumas pada waktu itu bisa terlepas dari jeratan pelepas uang.

Di dalam mendirikan bank tersebut, Raden Patih membutuhkan modal yang tidak sedikit. Modal pendirian bank Priyayi tersebut berawal dari dana pribadi yang beliau miliki "*schuld afkoop*", yaitu membayarkan utang para priyayi yang terjerat utang pada lintah darat (Suharto, Mengenal Bank Perkereditan Rakyat Indonesia, 1985, p. 8). Usaha mengumpulkan modal juga di dukung oleh keluarga Raden Patih seperti menjual perhiasan istri-nya dan mengurangi uang jajan anak-anaknya demi mewujudkan gagasan mulia tersebut (Bapak Poerwito, 2019). Namun, uang yang terkumpul masih dirasa kurang untuk membantu para pegawai pemerintah untuk lepas dari rentenir, hingga dengan persetujuan atasannya memberikan izin untuk menggunakan uang kas masjid sebesar f 4.000,- (Suharto, Mengenal Bank Perkereditan Rakyat Indonesia, 1985, p. 8).

Aktivitas kredit yang dilakukan Raden Patih ini semakin berkembang bukan hanya memberikan pinjaman kepada pegawai pemerintahan saja tetapi semua lapisan masyarakat Banyumas, seperti: petani, nelayan, pengkraji dan tukang. Lembaga ini dinilai sangat membatu seluruh lapisan masyarakat karena pinjaman tersebut diberikan dengan bunga yang rendah dan waktu pengembalian yang cukup lama. Hal inilah yang membuat kondisi perekonomian masyarakat Banyumas membaik karena terlepas dari jeratan pelepas uang.

Hingga kesulitan mulai terjadi saat aktivitas penggunaan dana kas masjid untuk dana pinjaman masyarakat tersebut terdengar juga oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 22 April 1894 Pemerintah Hindia Belanda menegaskan kembali bahwa dana masjid hanya boleh digunakan untuk keperluan keagamaan. Pemerintah Belanda menuntut Raden Patih untuk mengembalikan dana kas masjid sebesar f 4.000,-. Hal itu memberatkan Raden Patih karena pada saat itu dana kas masjid masih berada ditangan para nasabah. Pengembalian dana kas masjid dalam waktu dekat tentu saja merupakan masalah yang cukup serius yang dihadapi oleh

Raden Patih (Suharto, Mengenal Bank Perkereditan Rakyat Indonesia, 1985, p. 29).

Masyarakat Purwokerto yang mendengar berita tersebut merasa simpati dengan apa yang dialami oleh Raden Patih. Raden patih merupakan sosok yang sangat dikagumi dan dicintai oleh rakyatnya. Hingga masyarakat Purwokerto berusaha membantunya dengan mengumpulkan dana agar dapat mengembalikan dana masjid dengan segera. Simpati tersebut bukan hanya datang di kalangan pribumi saja tetapi juga kalangan Eropa yang ikut mengumpulkan dana tersebut.

Tanpa perlu waktu yang lama, masyarakat Purwokerto berhasil mengumpulkan dana untuk membantu Raden Patih Aria Wirjaatmadja. Dana lebih yang dikumpulkan masyarakat dijadikan modal awal untuk mengembangkan lembaga perkreditan ini agar dapat membantu lebih banyak orang. Lembaga rintisan Raden Aria Wirjaatmadja semakin berkembang dan masih eksis sampai sekarang dalam dunia perbankan di Indonesia. Tepat setiap tanggal 16 Desember diperingati sebagai hari lahirnya BRI.

Bank Rakyat Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang dan berliku, lembaga yang lahir sebagai bagian sejarah dari berbagai masa baik Pemerintahan Belanda, Pendudukan Jepang maupun Pemerintah Indonesia. Saksi bisu mata rantai sejarah perjuangan bangsa Indonesia hingga melahirkan nilai nasionalisme. Pergantian nama, fungsi maupun peran kerap kali terjadi seiring pemerintahan dan kebijakan yang berlaku pada saat itu. Mulai dari Pendirian di tahun 1895 dengan nama Bank Priyayi, yang kemudian di lebur dalam Bank Rakyat pada tahun 1897, dan selanjutnya diambil alih oleh pemerintah Belanda pada tahun 1934 dengan nama *Algemeen Volkscredietbank* (AVB), dan terjadi perubahan nama menjadi *Syomin Ginko* pada saat pendudukan Jepang di tahun 1942-1945, hingga pada akhirnya dinasionalisasikan menjadi BRI oleh Pemerintah RI pada tahun 1946 dan masih eksis sampai hari ini.

Nasionalisasi Bank Rakyat Indonesia (1946)

Kondisi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan masih sangat buruk. Proses pergantian pemerintah dari kolonial ke Republik menimbulkan gejolak disemua aspek kehidupan bernegara. Atmosfer politik pada saat itu juga masih

tidak menentu. Ancaman baik dari luar ataupun dari dalam negeri sewaktu-waktu dapat menggulingkan pemerintahan yang sah. Hal tersebut semakin memperparah kondisi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Secara umum, pada waktu itu kemerdekaan belum memiliki dampak apapun terhadap kemakmuran bangsa (Ricklefs, 2007, p. 470).

Gejolak yang muncul diawal kemerdekaan bukan hanya terjadi dalam aspek politik saja, melainkan juga dalam aspek ekonomi dimana bangsa Indonesia harus mengalami situasi kemandegan baik secara mikro maupun makro. Di awal kemerdekaan yang menjadi fokus pemerintah adalah menjaga kedaulatan sehingga banyak berbagai aspek kehidupan yang terabaikan dan meprihatinkan. Kondisi politik yang tidak stabil diawal kemerdekaan sangat mempengaruhi kondisi ekonomi bangsa Indonesia.

Tantangan dibidang ekonomi sangat berat yang harus dihadapi Indonesia mulai dari kehancuran disektor produksi, blokade ekonomi yang dilakukan Belanda, inflasi karena tak terkendalinya peredaran mata uang, hingga masalah keuangan dan kekosongan kas negara. Untuk menjawab tantangan dan upaya pemerintah untuk menstabilkan kondisi pada saat itu, Pemerintah mulai menargetkan untuk mengambil alih sektor perbankan. Salah satu bank yang diambil alih oleh Pemerintah Indonesia adalah *Syomin Ginko*. Pemilihan bank ini dinilai karena cukup aktif berperan dalam masa kependudukan Jepang dan bank ini telah memiliki cabang yang cukup menyebar diberbagai daerah di Indonesia yang pada saat itu kordinasi kerja disesuaikan dengan pembagian wilayah angkatan bersenjata Jepang. Adapun koordinasi kerja *Syomin Ginko* sebagai berikut: *Borneo Syomin Ginko* (Kalimantan) dan *Celebes Syomin Ginko* (Sulawesi) yang berada dibawah kekuasaan angkatan laut Jepang yang bermarkas di Makassar (Ujung Pandang), *Jawa Syomin Ginko* (Jawa) dan *Sumatra Syomin Ginko* (Sumatra) dengan 98 cabang dan kantor pusatnya di Jakarta berada dibawah kekuasaan angkatan darat Jepang yang bermarkas di Jakarta (Bank Rakyat Indonesia, 1995, p. 24).

Walaupun pada saat itu juga, mulai diajukannya gagasan pendirian Bank Negara Indonesia untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang

ekonomi dan keuangan oleh Margono Djojohadikusumo yang merupakan salah satu putra daerah Purwokerto yang berprestasi dengan dimulai mendirikan Yayasan Pusat Bank (Surat Kabar Antara, 19 Mei 1947). Tetapi dikarenakan kondisi politik yang tidak stabil dan kekosongan kas negara membuat gagasan tersebut mengalami hambatan dan berbagai penolakan diawal karena dalam mendirikan suatu bank membutuhkan pertimbangan yang matang dan modal yang cukup besar, sedangkan pengeluaran negara di awal kemerdekaan ditujukan untuk proses mempertahankan kedaulatan baik dari ancaman luar ataupun ancaman internal di Republik.

Kondisi ekonomi yang mengalami kekacauan membutuhkan penanganan segera untuk tetap mempertahankan kekuatan ekonomi Indonesia. Sehingga pemerintah Indonesia mulai merintis pembentukan Bank Rakyat Indonesia yang semula adalah *Syomin Ginko*. Proses transisi *Syomin Ginko* dimulai Setelah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, orang-orang Jepang yang memimpin *Syomin Ginko* dianjurkan agar mengundang para pimpinan kantor cabang *Syomin Ginko* ke Jakarta untuk merundingkan peralihan yang tengah berlangsung. Dalam rapat yang berlangsung di gedung Escompto, para pemimpin Jepang didesak agar menyerahkan kekuasaannya kepada pegawai-pegawai senior Indonesia. Namun, para pemimpin Jepang pada saat itu menolak menyerahkan *Syomin Ginko* dengan alasan mendapat tugas dari Sekutu untuk mempertahankan "*Status quo*" di Indonesia hingga Sekutu mendarat dan mengambil alih semuanya (Bank Rakyat Indonesia, 1995, p. 29).

Hingga pada akhirnya, setelah orang-orang Jepang yang menjadi pimpinan *Syomin Ginko* semakin terdesak mulai diadakannya perundingan dengan empat pejabat senior Indonesia mengenai pengambilalihan kekuasaan *Syomin Ginko*. Empat pejabat senior Indonesia, yaitu: M. Harsoadi, M. Soegijono Tjokrowiriono, R. Ng. Ismail dan TB. Sabarudin, yang kemudian dikenal sebagai "Pemimpin Empat" (Bank Rakyat Indonesia, 1995).

Pada awal bulan Oktober 1945 terdorong didaulatnya *Syomin Ginko* menjadi BRI, secara *de facto* BRI dikuasai oleh tenaga-tenaga dari Indonesia. Direksi pertama BRI adalah M. Harsoadi (Presiden Direktur), M. Soegijono

Tjokrowiriono (Direktur), M. Soemantri Direktur merangkap Sekretaris). Hingga perubahan *Syomin Ginko* menjadi BRI ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 pada tanggal 22 Februari 1946. Peraturan tersebut ditetapkan oleh Presiden Soekarno di Yogyakarta. Dengan dikeluarkannya PP itu akhirnya secara *de facto* dan *de jure* BRI menjadi bank milik pemerintah yang pertama.

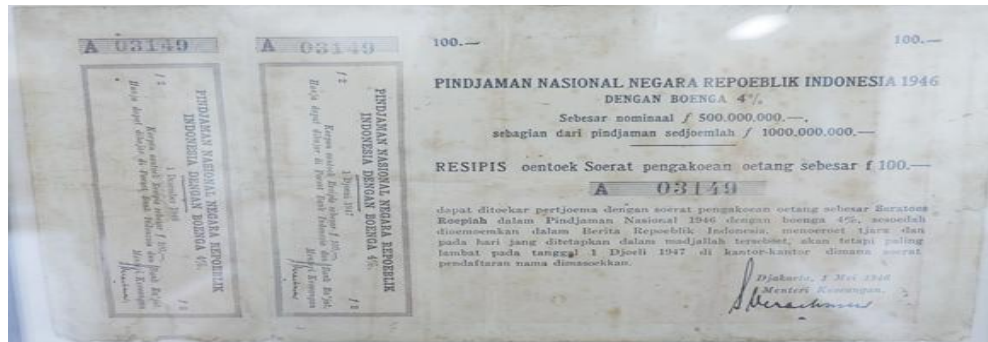
Peraturan Pemerintah tersebut merupakan langkah awal yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi kekacauan di bidang ekonomi, karena Pada awal pertumbuhan ekonomi RI pemerintah dihadapkan kepada situasi yang serba kacau akibat pendudukan Jepang. Barulah pada bulan Februari 1946 pemerintah mulai perakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Konfrensi ekonomi yang diadakan pada bulan Februari 1946 merupakan perintisan dari pemecahan masalah ekonomi secara menyeluruh. Konfrensi ini dipimpin oleh Ir. Darmawan Mangunkusumo sebagai Menteri Kemakmuran. Tujuan konferensi ini ialah untuk memperoleh kesepakatan yang bulat di dalam memnganggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Permasalahan yang dibahas yaitu: masalah produksi dan distribusi bahan makanan, masalah sandang, status dan administrasi perkebunan-perkebunan (Poesponegoro, 2011, p. 225).

Usaha pemerintah untuk mengatasi kesulitan ekonomi dan moneter pertama-tama adalah melakukan pinjaman nasional karena kekosongan kas negara sedangkan pengeluaran semakin meningkat membuat pemerintah berupaya untuk mengambil aset milik Jepang dan menasionalisasikannya menjadi milik pemerintah Indonesia. Berdasarkan usul dari Mentri Kemakmuran pada saat itu Ir. Darmawan Mangunkusumo untuk menasionalisasikan *Syomin Ginko* menjadi BRI.

Bank Rakyat Indonesia mempunyai peran yang sangat vital sebagai bank pemerintah pertama diawal kemerdekaan. Setelah nasionalisasi BRI ini terlaksana, nasabah utama dan pertama BRI adalah pemerintah sendiri. Atas persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), Menteri Keuangan Ir. Surachman melaksanakan pinjaman direncanakan akan meliputi Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dibagi atas dua tahap. Pinjaman akan dikembalikan selambat – lambatnya dalam waktu 40 tahun (Majalah Makmoer, 1949).

Gambar 1. Bukti Pinjaman Nasional Negara Republik Indonesia 1946



Sumber: Museum BRI di Purwokerto

Pada waktu itu Pemerintah memang membutuhkan banyak dana yang bersifat mendesak. Dana pinjaman tersebut dipergunakan untuk keperluan PMR (Persediaan Makanan Rakyat) dan RAPWI (*Rescue of Allied Prisoners of War and Internees*), berbagai keperluan mendadak dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertahanan. Kebutuhan dana tersebut sebagian besar dapat dipenuhi oleh BRI dari uang hasil Pinjaman Nasional 1946 (Bank Rakyat Indonesia, 1995, p. 32). Pelaksanaan pinjaman tersebut dinilai sukses dalam membantu memperbaiki kondisi yang sedang genting. Sukses yang dicapai oleh pemerintah itu dapat dijadikan ukuran bagi dukungan rakyat. Ditinjau dari segi politik, sukses ini menunjukkan kekeliruan perhitungan pihak Belanda mengenai kekuatan ekonomi Indonesia yang akan ambruk.

Kebutuhan ekonomi dan militer yang mendesak pada saat itulah yang mendasari Menteri Kemakmuran berinisiatif untuk memberikan usul menasionalisasikan *Syomin Ginko* yang sebelumnya bernama *Algemeene Volscredietbank* menjadi BRI. Di dalam Pasal 2 PP No.1 Tahun 1946 yang menyatakan daerah perkerjaan Bank Rakyat Indonesia ialah seluruh Indonesia, yang demikian secara *de facto* maupun *de jure* BRI menjadi Bank Pemerintah Pertama sebagai pelengkap negara Republik Indonesia. Di tahun 1946 politik dan keamanan yang belum stabil membuat pusat BRI terpaksa pindah yaitu mengungsi ke Purwokerto, kota Purwokerto dipilih dengan alasan karena

memiliki kondisi yang lebih aman di bandingkan kota Jakarta ataupun Yogyakarta. Namun, BRI tetap menyisihkan kantor cabangnya di Jakarta dan Yogyakarta mengikuti kementerian induknya.

Perkembangan BRI Setelah Dinasionalisasikan di Purwokerto (1946-1950)

Pada tahun 1946 tepatnya pada 22 Februari berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penetapan Bank Rakyat Indonesia menjadi Bank Pemerintah Pertama, yang mengartikan secara resmi bahwa bank yang sebelumnya bernama *Syomin Ginko* pada masa pendudukan Jepang telah diambil alih oleh bangsa Indonesia dan BRI menjadi satu-satunya bank pemerintah RI di awal kemerdekaan sebelum lahir Bank Negara Indonesia. Kondisi politik dan sosial-ekonomi bangsa Indonesia di awal kemerdekaan yang mendorong Ir. Darmawan Mangunkusumo sebagai Menteri Kemakmuran pada saat itu mengusulkan untuk menasionalisasikan *Syomin Ginko* menjadi BRI.

Dinamika perubahan nama *Syomin Ginko* menjadi BRI tidak mempengaruhi pelayanan BRI khususnya di daerah Purwokerto. Setelah keadaan mulai kondusif, BRI di Purwokerto langsung diambil alih oleh pengurus dari bangsa Indonesia. Gejolak politik pada waktu itu tidak sampai membuat BRI di Purwokerto mengalami kepalitan. Banyaknya nasabah yang tidak bisa mengembalikan kredit masih dapat diatasi oleh bank pada waktu itu (Warta Bank Rakyat Indonesia, 1950).

Kondisi keuangan BRI pada masa permulaan kemerdekaan sebenarnya relatif baik. Di samping membantu pemerintah dalam masa perjuangan, BRI juga melayani masyarakat baik yang berpenghasilan tetap, masyarakat pedesaan, serta pengusaha menengah dan nasional meskipun dengan pelayanan yang masih sederhana (Museum BRI: Lokakarya Guru Museum BRI). Nasabah pertama dan utama BRI setelah dinasionalisasikan adalah pemerintah sendiri, selain itu pinjaman juga dilakukan oleh Fonds Nasional Indonesia yang digunakan untuk kepentingan perjuangan (Arsip Nasional Republik Indonesia Kementerian Dalam Negeri Nomor 22, 25 Djuni 1948) serta pinjaman dilakukan oleh Yayasan Pusat Bank Indonesia yang pada saat itu sedang memproses pembentukan Bank Negara

Indonesia dan keberadaan BRI ini juga dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat Purwokerto seperti petani, nelayan dan pengkrajin.

Semangat kemerdekaan yang berkobar-kobar pun ikut membakar semangat baru perekonomian, misalnya dari kalangan penduduk desa muncul suara-suara yang menghendaki agar pengkreditan untuk mereka dapat diatur sendiri, antara lain dengan jalan koperasi. Muncul pula golongan menengah pengusaha nasional Indonesia yang berlomba-lomba hendak mengganti golongan menengah pengusaha Belanda yang telah “lenyap” sejak masuknya Jepang dan kedudukan menengah Tionghoa yang mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya.

Di Dalam menghadapi golongan pengusaha menengah nasional itu, BRI menyadari pentingnya kedudukan mereka dalam pembentukan dan pembangunan struktur perekonomian nasional. Sekalipun pelayanan kepada golongan menengah tersebut bukan merupakan hal baru bagi BRI, namun tetap merupakan tantangan, karena:

1. Jumlah peminjam maupun pinjaman yang diajukan jauh di atas jumlah yang dihadapi semasa AVB maupun *Syomin Ginko*
2. Sebagian besar kegiatan BRI waktu itu lebih difokuskan kepada pelayanan perkreditan kecil
3. Perkreditan menengah ketika itu hanya merupakan perkreditan kepada “*handeldrijvende midden-stand*” yang mempunyai pengaruh inflatif
4. Perkreditan menengah memerlukan:
 - Pelayanan individu dalam persiapan dan pengawasannya
 - Hubungan saling mengenal antara bank dan pinjaman, untuk mendapatkan kepercayaan dan jaminan keamanan kredit
 - Kesanggupan bank untuk mengikuti perkembangan perusahaannya dan menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan
5. Sistem yang mengatur perkreditan menengah masih jauh dari sempurna. (Bank Rakyat Indonesia, 1995, p. 33)

Di awal kemerdekaan Indonesia dengan situasi politik dan keamanan yang belum stabil menjadi ancaman tersendiri bagi BRI yang baru saja ditetapkan. Kedatangan Belanda kembali di Indonesia mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, bukan hanya aspek politik saja tetapi juga sosial-ekonomi. Keadaan semakin kacau dan ketegangan mulai terjadi saat Belanda mulai melancarkan Agresi Militer Belanda I di tahun 1947 yang memungkinkan Belanda (NICA)

dapat menguasai hampir seluruh wilayah di Indonesia dan menyingkirkan pemerintahan RI sehingga wilayahnya menjadi pedalaman Jawa dan Sumatra saja.

Pada 21 Juli 1947 seluruh kekuatan laut, udara dan darat Belanda dikerahkan untuk menyerang wilayah Republik Indonesia. Agresi pertama, yang disebut Belanda “Aksi Polisionil” telah dilancarkan. Akibat agresi ini Belanda berhasil memperluas daerah kependudukannya yang ada di Indonesia. (Nani Mulyani dkk, 1995, p. 126) Bagi Pemerintah RI aksi tersebut merupakan pelanggaran dari perundingan Linggarjati. Salah satu akibat adanya Agresi Militer I yaitu membuat kegiatan BRI mulai terganggu. Perlawanan masih terus dilakukan Indonesia baik dengan jalan perang atau diplomasi untuk mempertahankan kedaulatan RI. Salah satu perundingan yang dilakukan yaitu Renville yang menghasilkan “perjanjian Renville” dan dianggap merugikan pihak Indonesia.

Adanya pembagian wilayah hasil dari Perjanjian Renville yang merugikan RI, ternyata mengganggu kelancaran operasi BRI karena wilayah kerjanya semakin sempit. Jumlah Kantor Cabang di Jawa dan Madura yang semula 68 dipersempit menjadi 29 yang dipimpin oleh Kantor Besar di Yogyakarta. Gangguan itu dirasakan semakin berat dengan dioprasikannya kembali *Algemeene Volkscredietbank* (AVB) oleh pemerintah NICA. *Algemeene Volkscredietbank* (AVB) kembali beroperasi di wilayah yang dikuasi NICA. Selain tidak mengakui keberadaan BRI, pemerintah NICA juga menuntut agar BRI dilebur ke dalam AVB. Ini masalah yang rumit baik secara organisatoris maupun politis. Suatu hal yang tidak dapat dihindari dari adanya dua lembaga ini munculnya pegawai yang pro dan kontra. Pada umumnya bagi mereka yang tidak mau bergabung dalam AVB dianggap *non-cooperative* (Bank Rakyat Indonesia, 1995, p. 35).

Agresi Militer I yang dilakukan Belanda di tahun 1947 membuat kegiatan BRI terganggu akibat adanya dualisme kepemimpinan yaitu BRI yang berada di wilayah Pemerintah RI dan BRI yang akan dijadikan AVB kembali di dalam wilayah Pemerintahan Belanda. Permasalahan yang tercipta karena Agresi Militer I yang belum terselesaikan semakin diperparah karena adanya Agresi Militer Belanda II yang dilancarkan di tahun 1948. Kondisi semakin sulit untuk

dikendalikan oleh BRI karena para direksinya (Harsoadi dan Soegiono) serta para kepala bagiannya (Achmad Soemarsono, Soerastio, Ramelan dan Soedarto) (Bank Rakyat Indonesia, 1995) ditangkap atas tuduhan menggelapkan uang BRI untuk membantu para pejuang kemerdekaan.² Kekosongan kepemimpinan BRI ini dijadikan momentum penting untuk pihak Belanda mengambil aset BRI. Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berada di daerah RI akhirnya berhasil dikembalikan menjadi AVB oleh NICA. Sehingga, akibat kondisi yang genting menyebabkan kegiatan operasional BRI praktis terhenti selama kurang lebih setahun sampai Perjanjian Roem-Royen disepakati pada tanggal 7 Mei 1949.

Berita mengenai Agresi Militer yang dilakukan Belanda telah didengar oleh Dewan Keamanan PBB yang ketika itu bermarkas di Paris. Berbagai upaya negosiasi dilakukakan untuk meredam kondisi yang menegang antara Belanda dan Indonesia. Pada bulan Januari tahun 1949 dengan didesak resolusi Dewan Keamanan PBB, Belanda mengadakan pendekatan-pendekatan politis untuk melanjutkan perundingan Renville. Hingga terlaksana pertemuan pada tanggal 21 Januari 1949 antara delegasi *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO)³ yang terdiri atas Mr. Djumhana serta dr. Ateng dengan Presiden Soekarno beserta wakilnya Moh. Hatta untuk melanjutkan perundingan, (Surat Kabar Harian Merdeka, 11 Juli 1949) yang nantinya membawa Indonesia pada Perjanjian Roem-Royen.

Perjanjian Roem-Royen yang dilakukan pihak Indonesia dan Belanda membawa dampak baik bagi perkembangan BRI. Setelah disepakatinya Perjanjian Roem-Royen, para direksi BRI yang awalnya ditahan mulai dibebaskan dan BRI mulai aktif kembali beroperasi. Tahun-tahun berat di awal kemerdekaan menjadi pasang surut bagi lembaga keuangan ini, bertahan dengan berbagai kondisi baik aman maupun mengancam hingga eksis sampai hari ini.

Para pemimpin BRI yang dibebaskan mulai mengoperasikan kembali BRI di wilayah RI, berdasarkan perjanjian itu terdapat juga negara (federal)

²Tuduhan itupun sesungguhnya mengada-ada. Sebenarnya, yang terjadi adalah mereka ditangkap dan kemudian ditahan di penjara Wirogunan Yogyakarta, karena menolak tawaran bergabung kembali ke dalam AVB

³ BFO adalah musyawarah antara “negara-negara bagian” buatan Belanda

Indonesia Serikat selain negara bagian RI (Yogyakarta). Keadaan tersebut menimbulkan adanya “dua BRI”. Mulai 1 Januari 1950 secara *de jure* Kantor Pusat AVB di Jakarta Otomatis menjadi Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia Serikat (BARRIS) sementara BRI di Yogyakarta hanya merupakan Kantor Pusat BRI negara bagian. Sebagai akibatnya dalam pelaksanaan kerja terjadi beberapa kesulitan yang lebih bersifat psikologis. (Bank Rakyat Indonesia, 1995, pp. 36-37)

Oleh karena itu, pada tanggal 16 Maret 1950, Kementrian Kemakmuran RIS mengeluarkan pengumuman Nomor 1945/TU yang berisi ketetapan sebagai berikut:

1. Presiden Direktur BRI Yogyakarta merangkap jabatan sebagai Presiden Direktur AVB (BARRIS)
2. Kantor-kantor cabang AVB (BARRIS) di daerah Renville dihapus dan digabung menjadi kantor cabang BRI Yogyakarta
3. Kantor cabang AVB (BARRIS) yang berada di luar wilayah RI Yogyakarta memakai nama BRI. Namun, untuk membedakan dengan cabang-cabang di daerah RI, nama ditambah dengan AVB sehingga menjadi BRI AVB. Cabang-cabang ini masih di bawah koordinasi Kantor Pusat di Jakarta dan masih bernaung di bawah pemerintah federal serta tunduk pada *Staatblad* tahun 1934 Nomor 82. (Bank Rakyat Indonesia, 1995)

Kabinet RIS tidak dapat bertahan lama, usianya tidak mencapai lebih dari satu tahun. Kabinet RIS yang dipimpin oleh Moh. Hatta hanya dapat memerintah sampai tanggal 17 Agustus 1950. Pada hari itu RIS menjelma menjadi negara kesatuan Republik Indonesia (RI) kembali. Berbagai pemberontakan dilakukan oleh bangsa sendiri karena tidak percaya akan bentuk negara yang federal misalnya muncul pemberontakan APRA pada bulan Januari 1950, Pemberontakan di daerah Jawa Timur pada bulan Februari 1950, pemberontakan Andi Azis di Makassar awal bulan April 1950, dan pemberontakan yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia yang menuntut untuk kembali ke negara kesatuan.

Republik Indonesia Serikat (RIS) lahir dari hasil kompromi antara RI dan negara-negara federal ciptaan Belanda yang dicapai dalam Konferensi Inter-Indonesia dan dilanjutkan dalam KMB. Ini merupakan kompromi antar elite politik. Akan tetapi rakyat di negara-negara federal yang sejak akhir tahun 1949

menjadi negara bagian RIS, tetap menghendaki bentuk negara kesatuan. Hal inilah yang membuat usia Kabinet RIS tidak bertahan lama. Sehingga muncul kesepakatan antara RIS dan RI (sebagai negara bagian) untuk membentuk negara kesatuan yang tercapai pada tanggal 19 Mei 1950 dengan ditandatanganinya Piagam Persetujuan antara Pemerintah RIS dan Pemerintah RI. Di dalam piagam itu dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam waktu sesingkat-singkatnya bersama-sama melaksanakan pembentukan negara kesatuan. (Soepomo, 1950, pp. 133-139)

Pada tanggal 15 Agustus 1950 Soekarno dan Menteri Kehakiman RIS Mr. Soepomo menandatangani rancangan UUD tersebut yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (UUDS 1950). Penandatanganan dan pengumuman tentang berlakunya UUDS 1950, mengartikan bahwa Pemerintah RIS sudah dihapuskan dan Pemerintah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan sesuai dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sehubungan dengan hal tersebut *Staatsblad* tahun 1934 Nomor 82 tentang “*Bepalingen Betreffende de Algemeene Volkscredietbank*” (Anggaran Dasar AVB), dianggap kurang memadai lagi dan perlu diubah atau disempurnakan pada beberapa bagiannya. Pemerintah pun juga mulai membahas mengenai penghapusan AVB yang sempat beroperasi pada saat agresi militer agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan di dalam BRI. Undang-undang penghapusan AVB sebenarnya sudah dibahas dan disetujui oleh parlemen bersamaan dengan penggantian pajak bumi. Hal tersebut dibahas dalam sidang parlemen pleno terbuka dengan suara 90 lawan 3. Hasil suara yang bulat dengan menyetujui undang-undang penghapusan *Algemeene Volkscredietbank* (AVB). Adapun pokok-pokok dari rencana penghapusan AVB sebagai berikut:

Likwidasi AVB dijalankan oleh Bank Rakjat Indonesia, ialah Bank Pemerintah yang didirikan dengan Peratoeran Pemerintah Repoeblik Indonesia tahoen 1946 Nomor 1, semoea milik AVB menjadi milik Bank Rakjat Indonesia dan oetang-oetang AVB dioper menjadi oetang BRI. Joemlah oetang pioetang, oeang kas, saldo pada bank-bank lain ditoetoep oleh pemerintah. Pegawai AVB menjadi pegawai BRI, sedangkan peratoeran-peratoeran gaji serta syarat bekerja tetap berlakoe hingga ada peratoeran yang baroe oleh BRI.” (Surat Kabar Pedoman, 23 Agustus 1951, p. 1)

Persetujuan oleh parlemen mengenai penghapusan AVB menandakan bahwa Bank Rakyat Indonesia Serikat (BARRIS) yang dilebur dalam AVB sudah tidak berlaku lagi. Namun terjadi berbagai hambatan saat proses peralihan pimpinan, perusahaan belum dapat berjalan lancar karena statusnya masih dalam peralihan dan masih banyak pimpinan cabang yang berkebangsaan Belanda. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidak-tentraman dikalangan pegawai bangsa Indonesia dan juga terdapat perbedaan gaji yang cukup besar antara tingkat gaji pejabat bangsa Eropa dan bangsa Indonesia. (Bank Rakyat Indonesia, 1995, pp. 37-38).

Melihat kondisi tersebut, membuat Pemerintah Indonesia bersikap tegas dengan mengeluarkan UU No. 12 Tahun 1951 Tentang Penghapusan Badan Hukum AVB (Arsip Kabinet Presiden No. 01, Oendang-Oendang Nomor 12 Tahun 1951) dan membuat pengaturan baru mengenai BRI yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tanggal 20 April 1951 tentang Penetapan BRI menjadi Bank Menengah (Warta Bank Rakyat Indonesia Tahun 1954, 1954) untuk mempertegas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946.

Situasi pemerintahan yang mulai mantap di tahun 1950 juga mempengaruhi kinerja BRI yang semakin baik. Pengakuan kedaulatan Indonesia yang disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dimuat dalam Undang-Undang No. 10/ 1949 tertanggal 14 Desember 1949. (Arsip Nasional Republik Indonesia: Sekretariat Negara RI No. 289, 1949) Membuat Pemerintah mulai fokus kepada berbagai bidang yang hancur karena perang kemerdekaan termasuk bidang ekonomi yang harus segera diatasi.

KESIMPULAN

Berbagai permasalahan muncul di awal kemerdekaan, Indonesia sebagai negara yang baru merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 harus menghadapi berbagai permasalahan baik di bidang politik maupun sosial-ekonomi. Permasalahan di bidang politik mengenai pengakuan kedaulatan menjadi fokus utama pemerintah, disamping membenahi permasalahan diberbagai bidang lainnya salah satunya bidang ekonomi. Keadaan ekonomi yang kacau dan memprihatinkan di awal kemerdekaan muncul disebabkan karena berbagai

persoalan seperti: kehancuran di sektor produksi, blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda, inflasi akibat beredar banyaknya mata uang dan kekosongan negara yang menuntut segera diatasi.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah RI untuk mengatasi permasalahan ekonomi di awal kemerdekaan yaitu dengan menargetkan pengambil alihan sektor perbankan. Salah satu bank yang diambil oleh Pemerintah RI adalah *Syomin Ginko* dengan berbagai pertimbangan. Tepat pada tanggal 22 Februari 1946 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 tentang penetapan BRI, secara resmi menjadikan BRI sebagai bank milik Pemerintah RI pertama sekaligus sebagai pelengkap kemerdekaan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Arsip

Arsip Negara Republik Indonesia, *Arsip Sekretariat RI No. 374*, Peratoeran Pemerintah No.1 Tahun 1946 tentang penetapan Bank Rakjat Indonesia

Arsip Negara Republik Indonesia, *Arsip Sekretariat RI No. 375*, Peratoeran Pemerintah No. 2 Tahun 1946 tentang pembentoekan BNI

Arsip Nasional Republik Indonesia, *Arsip Kementerian Dalam Negeri No. 22*, tertanggal 25 Djuni 1948 tentang permohonan pinjaman FKI

Arsip Nasional Republik Indonesia, *Arsip Kabinet Presiden No.01*, Oendang-Oendang No.12 Tahun 1951 tentang penghapoesan AVB

Arsip Nasional Republik Indonesia, *Arsip Sekretariat RI No.289*, Peratoeran Pemerintah Nomor 10 tahun 1949 tentang pengakuan kedaulatan Indonesia

Sumber Surat Kabar dan Majalah

Surat Kabar Bataviaasch Nieuwsblad, "*De Vader van het Lanbouwcrediet*" (Bapak Kredit Pertanian), Senin 15 Maret 1909

Surat Kabar Pedoman, *Rencana Undang-Undang Penghapusan AVB disetujui Parlemen*, Kamis 23 Agustus 1951.

Surat Kabar Antara, *Yayasan Poesat Bank*, 19 Mei 1947.

Surat Kabar Harian Merdeka, *49 Orang Wk. BFO ke KMB*, 11 Juli 1949

Majalah Makmoer, *Pindjaman Nasional Negara Republik Indonesia Tahoen 1946*, 10 Mei 1949

Warta Bank Rakyat Indonesia Tahun 1950, (Purwokerto: Koleksi Museum BRI, 1950)

Warta Bank Rakyat Indonesia Tahun 1953, (Purwokerto: Koleksi Museum BRI, 1953)

Warta Bank Rakyat Indonesia Tahun 1954, (Purwokerto: Koleksi Museum BRI, 1954)

Sumber Buku

Anonim, “*De Oprichting van de Eerst Hulp en Spaarbank Door Inlandsche Hoofden te Poewokerto*,” dalam *Tijdschrift van Nederlandsch-Indie II*, (1898).

Arsyad, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, (Yogyakarta: BPFE, 1999).

Bank Rakyat Indonesia (BRI), *Seratus Tahun Bank Rakyat Indonesia 1895-1995*, (Jakarta: Humas PT BRI Persero, 1995).

Danusaputro, Marjanto dkk., *Monetasi Pedesaan: Bunga Rampai Keuangan Pedesaan II*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1997).

Djiwandono, Soedrajat dkk., *Sejarah Bank Indonesia Periode I:1945-1959*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2005).

Kahin, George Mc Turnan, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, (New York: Cornel University Press, 1952).

Mulyani, Nani dkk., *50th Indonesia Merdeka (1945-1965): Fifty Years Independence Of Indonesia*, (Jakarta: PT. Citra Media Persada, 1995).

Poesponegoro, Marwati Djoened, *Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (1942 – 1998)*, (cet. V, Jakarta: Balai Pustaka, 2011).

Ricklefs, M.C *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007).

Soepomo, *Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, (Jakarta: Noordhoff-Kolff, 1950).

Suharto, Pandu, *100 Tahun BPR di Indonesia*, (Jakarta: Info Bank, 1996).

_____. “Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia” dalam *buku Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (Ringkasan Seminar)*, Anwar Hafid dan Jusuf M.Colter ed., (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 1987).

_____. *Mengenal Bank Perkreditan Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 1985).

_____. *Sejarah Pendirian Bank Pengkreditan Rakyat*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 1988).

Takdir, Dedy *Manajemen Perbankan (Pendekatan Oraktis)*, (Kendari: Unhalu Press, 2007).

Toer, Pramoedya Ananta dkk, *Kronik Revolusi Indonesia Jilid V (1949)*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014).

Yahya, IIP D. *Raden Aria Wirjaatmadja: Perintis Bank Pribumi*, (Purwokerto: Yayasan Raden Aria Wirjaatmadja, 2018).

Sumber Wawancara

Wawancara dengan keluarga Raden Aria Wirjatmadja Bapak Poerwito, 25 Maret 2019

Sumber Internet

Museum BRI, *Lokakarya Guru Museum BRI* “[http://brimuseum .blogspot.com/?m=1](http://brimuseum.blogspot.com/?m=1),” diakses pada 5 Mei 2019, Pukul 01:31 WIB.